

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasari oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah jauh lebih memahami potensi, kondisi, dan permasalahan daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, setiap daerah juga lebih mengerti besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dengan diberlakukannya otonomi daerah maka wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri mulai dirancang oleh masing-masing daerah.¹Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 maka dibentuklah desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam

¹ Kris Setyaningsih, *Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan dalam Pembangunan masyarakat, E-Journal Radenfatah.ac.id*, 2017, Volume 3, Issue 1 hal 78

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah – daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.²

Pemberian otonomi daerah di era reformasi dari masa orde baru yang berlaku sistem (sentralisasi) memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah sendiri atau bisa dikatakan masalah bagi pemerintah daerah apakah pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan menggali potensi daerah yang ada dengan baik sehingga keuangan pemerintah daerah akan membaik dengan diberi kewenangan desentralisasi atau malah sebaliknya akan semakin menurun.

Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.³

Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Produk Domesik Regional Bruto (PDRB) untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, ini karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produk barang dan jasa disatu wilayah perekonomian dan selang waktu tertentu, produksi

² Syamsuddin haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah*, (Jakarta. LIPPI Pres, 2007), hal 52

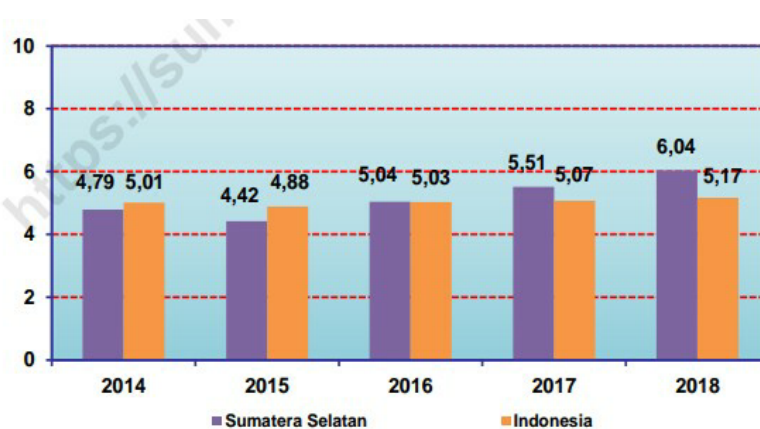
³ Todaro.michael P. *pembangunan ekonomi*, (Jakarta : Erlangga.2006)

tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi diwilayah bersangkutan yang secara lokal.

Terdapat dua macam harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). ADHB menggunakan harga yang berlaku yang masih terpengaruh oleh besaran inflasi dalam menghitung nilai aktifitas ekonomi sementara. ADHK menggunakan harga konstan yang biasanya ditetapkan tahun tertentu sebagai tahun dasar sehingga harga-harga yang berlaku pada tahun-tahun setelahnya disesuaikan terlebih dahulu dengan tahun dasar dengan menghilangkan pengaruh inflasi dari harga tersebut pada tahun perhitungan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara membandingkan PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya berdasarkan ADHK.

Grafik 1.1

Laju Pertumbuhan PDRB Indonesia dan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), 2014-2018



Sumber : BPS SumSel, 2019

Laju pertumbuhan PDRB meningkat disebabkan oleh meningkatnya lapangan usaha seperti pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, perdagangan, angkutan dan akomodasi, keuangan, jasa-jasa, listrik, gas, dan air bersih, bangunan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses perkembangan wilayah semakin baik. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah PDRB.

PDRB suatu daerah dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep PDRB adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi domestik namun bukan satu satunya indikator pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu.

Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dengan peran pemerintah dengan program-programnya yang ingin mensejahterakan rakyat. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari pendapatan asli daerah yang tinggi pula maka disinilah peran otonomi daerah,

yang dapat memberdayakan potensi daerah masing-masing. Kebebasan pemerintah daerah dalam hal merencanakan keuangan daerah dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja daerah yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diperlukan dalam perencanaannya belanja daerah masuk kedalam anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD).⁴

Menurut UU No. 33 tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan pendapatan asli daerah akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi serta lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber penerimaan lain yang dapat digunakan untuk membiayai belanja.⁵

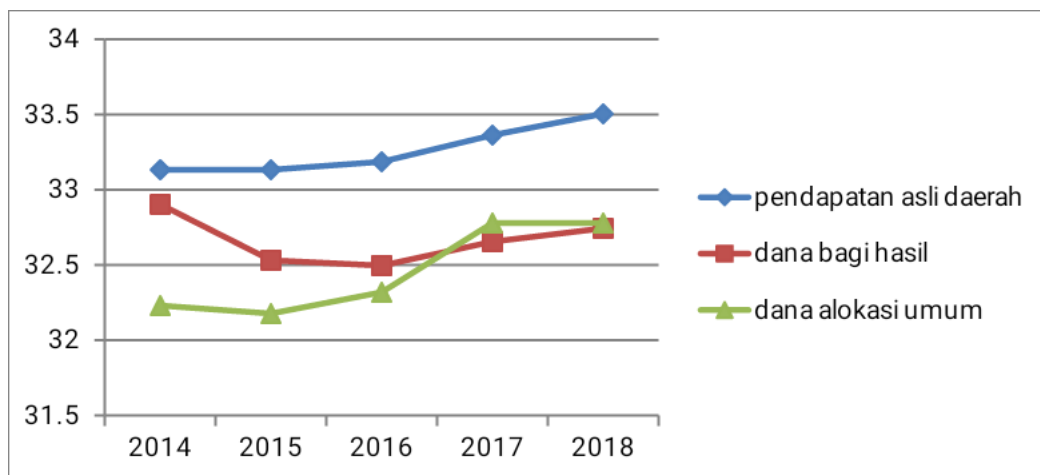
⁴Putu Irwan, Ni Luh Karmini, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening*. E-jurnal EP Unud, 2014, Volume 5, Issue 3, hal 341

⁵Lily Kusumawati, I Gusti Bagas Wiksuana, *pengaruh pendapatan asli daerah*

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan produk domestik regional bruto yaitu pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum.

Grafik 1.2

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum tahun 2014-2018



Sumber : BPS SumSel, 2019

Penyebab dari pertumbuhan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang mengalami kenaikan atau penurunan tergantung dari seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya.

Secara keseluruhan pendapatan asli daerah mengalami naik dan turunnya dari tahun 2014-2018. Pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2014 memiliki dana sebesar 2.422 triliun dan di tahun 2015 sebesar 2.413 triliun dan pada tahun 2016 sebesar 2.546

triliun, pada tahun 2017 sebesar 3.031 triliun dan di tahun 2018 sebesar 3.528. Namun ditinjau dari dana bagi hasil cenderung mengalami naik turun setiap tahunnya. pertumbuhan dana bagi hasil yang meningkat itu terjadi Pada tahun 2014 memiliki dana sebesar 1.934 triliun, tetapi ditahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1.328 triliun, dan pada tahun 2016 sebesar 1.286 triliun pada tahun 2017 sebesar 1.507 triliun serta ditahun 2018 sebesar 1.643. penurunan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil umber daya alam disebabkan karena turunnya rencana penerimaan provinsi yang dihasilkan. Pertumbuhan dana alokasi umum menunjukkan pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya. jumlah pertumbuhan dana alokasi umum yang meningkat pada tahun 2014 sebesar 985 miliar dan ditahun 2015 memiliki dana sebesar 931 miliar dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 1.071 triliun, tahun 2017 sebesar 1.697 triliun serta di tahun 2018 sebesar 1.697 triliun.

Pendapatan asli daerah dengan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut undang-undang no. 33 tahun 2004 pasal

1,“ pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Dana perimbangan dalam penelitian terdiri dari dua usur yaitu dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Pengoptimalan perolehan dana bagi hasil yang dianggap sebagai modal bagi kepentingan pembangunan daerah akan mempercepat pertumbuhan PDRB. Dana bagi hasil bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBHTB), dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB. sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.⁶

⁶Nurlan darise. *akuntansi keuangan daerah*. PT Indeks, Jakarta,2008. hlm.135 - 137

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam UU no 33 tahun 2004 telah dinyatakan dengan tegas bahwa dana alokasi umum dibagikan dengan formula yang didasarkan atas alokasi dasar dan kesenjangan fiskal.⁷ pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bahwa penggunaan dana perimbangan khususnya dana alokasi umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan peneliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi mendapat hasil sebagai berikut :

Tabel 1.1

***Research Gap* pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi**

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan	Hasil penelitian	Peneliti
	pendapatan asli daerah terdapat pengaruh positif Dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Erlinda Siagian (2018) ⁸

⁷ Agus prawoto. *pengantar keuangan publik*. BPFY-Yogyakarta, 2015. hlm.405

⁸ Erlinda Siagian, *pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi D.I Yogyakarta tahun 2010*

ekonomi	pendapatan asli daerah terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Rosita N. Laranga, Daisy S.M Engka, George M.V Kawung (2017) ⁹
	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Andi Gustiana (2014) ¹⁰

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019

Pengaruh pendapatan asli daerah yang diteliti oleh Erlinda Siagian (2018) Menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linier berganda dengan hasil t-hitung $9.362 > t\text{-tabel } 1.69552$. Hal ini berbeda dengan penelitian Rosita N. Laranga, Daisy S.M Engka, George M.V Kawung (2017) yang menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Halmahera Utara dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menunjukkan hasil t-hitung $1.487 < t\text{-tabel } 2.447$ dengan nilai signifikan 0.005 . Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Gustiana (2014) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menunjukkan hasil nilai t-hitung $1.179 < 1.695$ nilai probabilitas signifikan $0.248 > 0.05$.

⁹Rosita N. Laranga, Dkk. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Halmahera utara tahun (2004-2013)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol,17 No. 01. 2017

¹⁰Andi Gustiana. *Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi empiris pada pemerintah kabupaten soppeng periode 2005-2012)*. Universitas Hasanuddin Makasar. Skripsi. 2014

Tabel 1.2

***Research Gap* dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi**

Pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian	Peneliti
	Dana bagi hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi	Nurul widyasari (2013) ¹¹
	Dana bagi hasil terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Wulan Fauznyi (2013) ¹²
	Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Saleh (2017) ¹³

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019

Pengaruh dana bagi hasil yang diteliti oleh Nurul widyasari (2013) menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan analisis data panel dengan hasil probabilitas 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Wulan Fauznyi (2013) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data panel dan alat analisis *fixed effect model* dengan hasil t-hitung $0.942384 < 2.132$ pada tingkat keyakinan 0.05. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari

¹¹ Nurul widyasari, *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana aalokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB)*, studi empiris kabupaten/kota diprovinsi jawa tengah, 2013.

¹² Wulan Fauznyi, *pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) pajak/bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah tahun 2003-2011*, Skripsi, 2013

¹³ Saleh. *Pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja daerah sebagai variable moderating pada kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah tahun 2010-2014*. Universitas muhammadiyah Surakarta. Skripsi. 2017

Saleh (2017) menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dengan hasil uji T nilai t-hitung $-0.660 < t$ –tabel 1.977 dengan nilai signifikan $0.510 > 0.05$.

Tabel 1.3

***Research Gap* dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi**

Pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian	Peneliti
	Dana alokasi umum terdapat pengaruh positif dan signifikan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi	Argo Fahma A.P, Ida Nuraini (2017) ¹⁴
	Dana alokasi umum terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Lily Kusumawati, I Gusti Bagus Wiksuana (2018) ¹⁵
	Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewa Gede Dharma Suputra (2017) ¹⁶

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019

Pengaruh dana alokasi umum yang diteliti oleh Argo Fahma A.P, Ida Nuraini (2017) Menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan nilai probabilitas $0.0004 > 0.05$. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Lily Kusumawati, I Gusti Bagus Wiksuana (2018) Yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

¹⁴ Argo Fahma A.P. Ida Nuraini. *Pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 1 jilid 2. 2017

¹⁵ Lily Kusumawati, I Gusti Bagus Wiksuana, *pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sarbagita provinsi Bali*, E-jurnal manajemen unud, volume 7, No 5, 2018: 2592-2620.

¹⁶ Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewa Gede Dharma Suputra. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi*. E-jurnal Akutansi Universitas Udayana. Vol. 18.3. 2017

pertumbuhan ekonomi di wilayah sarbagita provinsi bali dengan menggunakan analisis deskriptif dan data panel dengan hasil koefisien -2,328 dengan nilai signifikan 0.001 lebih kecil dari 0.05. hal ini berbeda dengan penelitian dari Ni Wayan Ratna Dewi. I Dewa Gede Dharma Suputra (2017) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan regresi linier berganda dengan hasil t-hitung -0.972 dengan signifikansi 0.339 lebih besar dari 0.05.

Berdasarkan latar belakang dan didukung oleh adanya *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018.**

1. 2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menjadimasalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018 ?
2. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018 ?

3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018 ?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018.

1. 4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

1. 5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain

:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masing - masing pemegang kebijakan, terutama pemerintah daerah didalam mengelola daerahnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan gambaran informasi sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya.